

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

LPKA Kelas I Blitar merupakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimana wilayah kerjanya berada dibawah Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur. Memiliki tugas dan fungsi menampung serta membina Anak Didik Pemasarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Letak geografis Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas I Blitar, tepatnya di Jalan Bali no.76, Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137. Mempunyai Luas Tanah: 111.593 m², Luas Bangunan: 25.172 m².

a. Sejarah Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Blitar

1. Dulu merupakan pabrik minyak “INSULIDE” milik pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian digunakan menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum. Dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara (RPN), penghuninya disebut Anak Raja.
2. Tahun 1948 RPN dibumi hanguskan Belanda (Agresi Militer BelandaII).
3. Tahun 1958 dibangun kembali oleh PemerintahIndonesia.
4. Pada tanggal 12 Januari 1962 RPN diresmikan Menteri Kehakiman RI Prof.Dr.SAHARDJO,SH.
5. Pada tanggal 27 April 1964 lahirnya Sistem Pemasarakatan.
6. Pada tanggal 26 Pebruari 1985 berubah nama menjadi LAPAS ANAK BLITAR.

7. Pada tanggal 15 Agustus 2015 berubah menjadi LPKA Kelas I Blitar sampai dengan sekarang

b. Visi, Misi dan Tujuan

VISI:

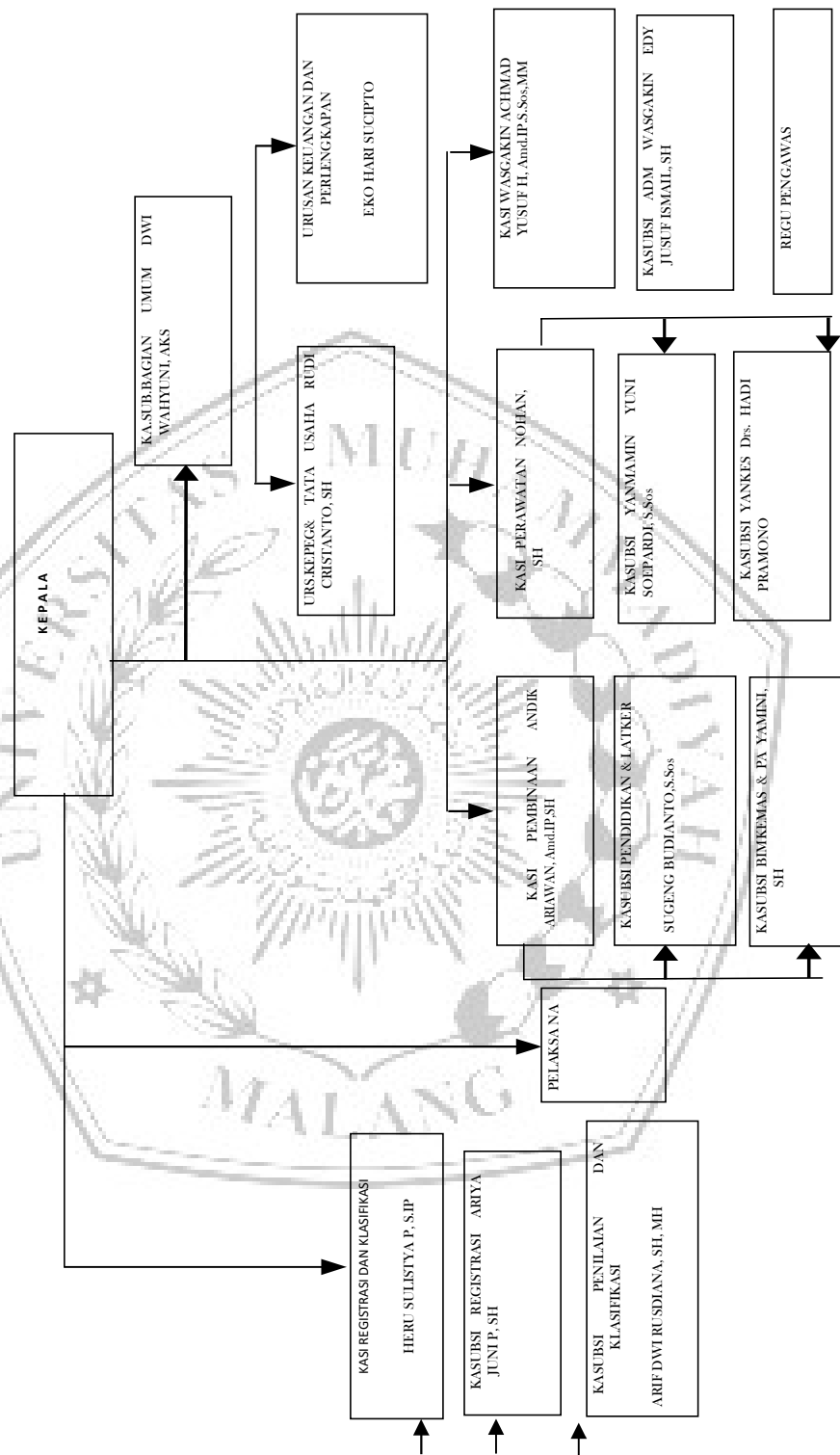
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri) dan mengembangkan Lapas Anak yang ramah anak, bebas dari Pemerasan, Kekerasan dan Penindasan.

MISI :

1. Melaksanakan pelayanan dan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Bimbingan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani permasalahan tentang anak.
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum.
4. Melaksanakan wajib belajar 9 tahun.

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS ANAK BLITAR



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar Merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertugas membina Anak Didik Pembinaan Khusus, Lembaga ini mempunyai kapasitas tampung Anak Didik sebanyak 220 anak, dan saat ini (kondisi per 31 Mei 2018) dihuni sebanyak 307 anak atau terjadi over kapasitas mencapai 139,54% yang terdiri dari 7 (tujuh) anak tahanan, 283 anak pidana, satu anak sipil dan 16 anak negara. Adapun komposisi penempatan pada blok hunian terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Anak Didik Pembinaan berdasarkan Penempatan pada Blok Hunian

No	Penempatan	Kamar	Jumlah		Ket
			Kapasitas	Isi	
1	Blok A	25	55 Anak	72 Anak	
2	Blok B	25	55 Anak	74 Anak	
3	Blok C	25	55 Anak	74 Anak	
4	Blok D	25	55 Anak	70 Anak	
5	Blok A & O	1	—	—	
6	Blok AS / AN	1	—	17 Anak	
Jumlah		57	220 Anak	307 Anak	

Sumber : LPKA Kelas I Blitar

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus anak memiliki 4 (empat) blok hunian, yaitu Blok A terdiri atas 25 kamar dengan kapasitas tampung 55 anak, dihuni 72 anak atau terjadi over kapasitas sebanyak 17 anak, Blok B terdiri atas 25 kamar dengan kapasitas tampung 55 anak dihuni 74 anak . Blok C terdiri atas 25 kamar dengan kapasitas tampung 55 anak dihuni 74 anak atau blok B dan C telah terjadi over kapasitas masing-

masing mencapai 19 anak, dan Blok D terdiri atas 25 kamar dengan kapasitas tampung 55 anak dihuni 70 anak atau over kapasitas 15 anak.

Adapun kamar hunian Anak Didik Pembinaan Khusus rata-rata berukuran 2x3 meter yang tersebar pada setiap blok. Sedangkan kamar bagi penghuni baru yang masih dalam tahap admisi dan orientasi (A&O) serta bagi anak sipil dan anak negara berukuran 5 x 8 meter. Masing-masing kamar dilengkapi dengan kasur busa dan perlengkapan lain, seperti piring (ompeng) dan gelas plastik. Sedangkan untuk keperluan mandi dan cuci, disediakan dua kamar mandi yang sekaligus berfungsi sebagai tempat mencuci bagi penghuni.

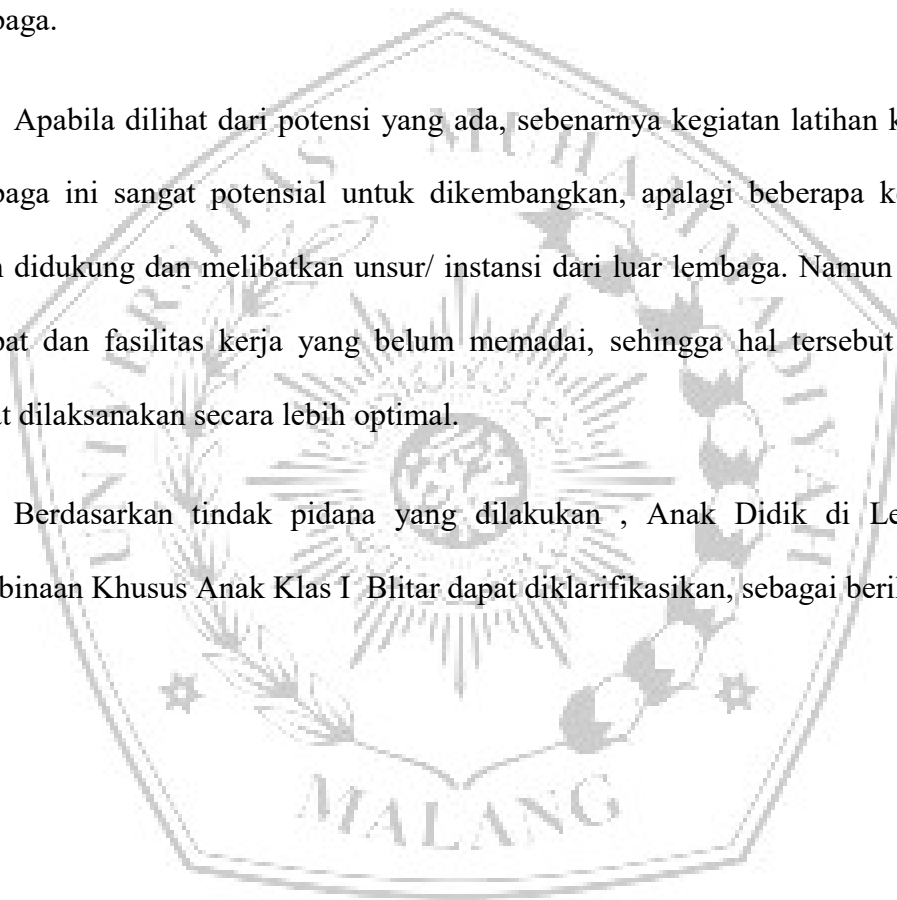
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar mempunyai beberapa ruangan sebagai komponen utama antara lain kamar Anak Didik Pemasyarakatan; kamar tahanan; ruang porter atau pintu gerbang; ruang kantor petugas pintu gerbang; ruang penyimpanan senjata api dan perlengkapan lainnya yang siap pakai; pos-pos pengamanan baik yang ada dibawah pada tiap blok hukuman maupun diatas tembok keliling dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup tinggi. Selain itu terdapat ruangan kunjungan dan tempat-tempat olahraga seperti bola volly, lapangan bulu tangkis, tenis meja, tempat bimbingan latihan ketrampilan dan aula pertemuan. Di samping itu Lembaga ini juga dilengkapi dengan sarana peribadatan berupa Masjid bagi pemeluk agama Islam dan gereja bagi pemeluk agama Kristen.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Blitar, kegiatan kerja wajib diikuti oleh semua Anak Didik Pembinaan dalam satu tempat. Bagi tahanan hanya diberikan pembinaan rohani, kesehatan/olahraga dan pembinaan

ketrampilan yang bersifat sukarela, sedangkan bagi anak pidana sifatnya wajib. Namun mengingat keterbatasan tempat dan sarana yang ada kegiatan ketrampilan kerja belum melibatkan seluruh anak pidana. Adapun latihan kerja yang diberikan, meliputi kegiatan menjahit, mencukur, dan pertukangan di dalam lembaga. Bagi mereka yang sudah memperoleh hak asimilasi dapat melakukan kegiatan kerja membuat batako, bidang pertanian dan peternakan di luar lembaga.

Apabila dilihat dari potensi yang ada, sebenarnya kegiatan latihan kerja di lembaga ini sangat potensial untuk dikembangkan, apalagi beberapa kegiatan telah didukung dan melibatkan unsur/ instansi dari luar lembaga. Namun karena tempat dan fasilitas kerja yang belum memadai, sehingga hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan , Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Blitar dapat diklarifikasikan, sebagai berikut :



Tabel 5. Jumlah Anak Didik Pembinaan berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2018

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	%	Ket
1	Pelanggaran Ketertiban	34	11.07	
2	Asusila	18	5.6	
3	Penculikan	1	0.33	
4	Pembunuhan	24	7.82	
5	Penganiayaan	18	5.86	
6	Pencurian	31	10.10	
7	Perampokan	17	5.54	
8	Pemerasan	4	1.30	
9	Penggelapan	3	0.98	
10	Penipuan	4	1.30	
11	Membawa Senjata Tajam	3	0.98	
12	Kenakalan Keluarga	1	0.33	
13	Narkotika	149	48.53	
Jumlah		307	100	

Sumber : LPKA Kelas I Blitar

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian dari jumlah penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Blitar adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni sebanyak 149 anak (48,53%). Jumlah ini disusul kasus pelanggaran ketertiban mencapai 34 anak (11,07%), kasus pencurian 31 anak (10,10%) dan terlibat kasus pembunuhan 24 anak (7,82%). Di samping itu data kasus yang cukup menonjol dan dalam kategori kejahatan orang dewasa adalah kasus penganiayaan yang mencapai 18 anak (5,84%) dan kasus perampokan 17 anak (5,54%). Sedangkan untuk kasus tindak pidana lainnya, rata-rata di bawah jumlah 10 anak.

Berdasarkan wawancara terhadap 20 (dua puluh) anak pidana yang dipilih sebagai responden, penulis dapat mengemukakan, bahwa sebanyak 17 anak atau 85% dari jumlah responden menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukan dan

merasakan pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan, 2 (dua) anak atau 10% menyatakan pidana yang dijatuhkan terlalu berat/ tindak sebanding dengan perbuatannya, sedangkan satu anak atau 5% tidak menjawab, tetapi hanya menundukkan kepala.

Tabel 6. Tanggapan Anak Pidana terhadap Putusan Pidana yang dijatuhkan

No	Status Anak Didik	Jumlah	%	Ket
1	Menyesal dan Setimpal	17	85	
2	Terlalu Berat	2	10	
3	Tidak Menjawab	1	5	
Jumlah		20	100	

Sumber : LPKA Kelas I Blitar

Tanggapan Anak Pidana terhadap kegiatan ketrampilan kerja yang diadakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Blitar, ternyata dari 20 responden yang diwawancarai menyatakan bermanfaat. Hal ini tidak lepas dari besarnya minat mereka untuk menguasai bidang ketrampilan tertentu disamping adanya dorongan beraktifitas guna mengisi waktu luangnya. Kemudian berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan jenis ketrampilan tersebut untuk diterapkan setelah selesai menjalani pidana, sebanyak 12 anak menyatakan akan memanfaatkan untuk mencari nafkah nantinya, 5 (lima) anak menyatakan ragu-ragu, dan 3 (tiga) anak menyatakan tidak menggunakan ketrampilan tersebut, karena memiliki ketrampilan lain.

Tabel 7 Tanggapan Anak Didik terhadap Jenis Keterampilan Yang diperoleh di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak

No	Status Anak Didik	Jumlah	%	Ket
1	Menyatakan akan memanfaatkannya setelah bebas	12	60	
2	Masih ragu-ragu	5	25	
3	Tidak ingin memanfaatkan	3	15	
Jumlah		20	100	

Dengan kondisi yang demikian dapatlah dipahami, bahwa proses pembinaan di Lembaga Pembinaan telah memberikan bekal ketrampilan kerja tertentu bagi anak, namun untuk pemanfaatannya tentu kembali pada peluang pasar yang tersedia di luar lembaga. Dari uraian ini terlihat, bahwa untuk mengefektifkan pembinaan anak pidana hendaknya tidak hanya dibebankan pada pihak Lembaga Pembinaan Anak semata, melainkan juga berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta serta LSM yang berada di luar. Dengan tidak adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, maka apa yang telah diperbuat Lembaga Pembinaan akan menjadi sia-sia, dan kejahatan baru dengan berbagai modusnya akan semakin meningkat.

Pengetahuan Anak Pidana tentang hak-hak yang dapat diperolehnya selama menjalani pidana, seperti hak asimilasi, hak pembebasan bersyarat, dan memperoleh cuti menjelang bebas, dari 20 anak pidana yang diwawancarai, sebanyak 18 anak (90%) yang telah mengetahui secara baik tentang adanya hak-hak tersebut dan sisanya sebanyak 2 anak (10%) yang belum mengetahui secara jelas mengenai hak-hak tersebut, terutama kapan dan bagaimana cara

memperolehnya . Dengan data ini tergambar bahwa pada umumnya mereka telah mengetahui hak-haknya dengan baik.

Berkaitan dengan pemberian hak asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas pada umumnya berlangsung dengan baik. Dalam artian tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, karena putusan pemberian hak tersebut relatif tepat waktu. Hal ini terkait dengan keberadaannya sebagai anak pidana yang harus memperoleh prioritas dan perlakuan khusus dibandingkan narapidana dewasa. Oleh karena itu bilamana anak yang secara administratif dan substantif telah memenuhi syarat memperoleh hak-haknya, maka sesegera mungkin petugas Lembaga Pembinaan akan mengajukan permohonan pemberian hak tersebut kepada pihak Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan atas nama Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian dalam bentuk pembinaan mental keagamaan diadakan setiap hari, dan harus diikuti oleh semua Anak Didik Pemasyarakatan terhadap pembinaan kepribadian berupa pembinaan mental agama, seluruh Anak Didik Pembinaan menyatakan bermanfaat, karena dapat menyadarkan Anak Didik Pemasyarakatan bahwa perbuatan jahat yang telah dilakukan adalah sebagai perbuatan yang keliru dan tidak boleh dilakukan.

2. Proses Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Proses Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bertujuan untuk membina Anak Didik

Pemasyarakatan agar menjadi lebih baik, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui tiga tahapan yang terpadu, yaitu sejak Anak Didik Pemasyarakatan diserahkan dari pihak Kejaksaan ke Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada tahap inilah sebagai tahap pertama atau tahap “Admisi & Orientasi” atau “A & O”, dengan kegiatan meneliti secara seksama / mendalam mengenai identitas, latar belakang sosial dan / atau perbuatan jahat serta sifat lainnya. Pemeriksaan pada tahap admisi dan orientasi, yaitu :

a. Unit Pendaftaran

Proses pendaftaran Anak Didik Pemasyarakatan meliputi kegiatan mencocokkan kembali putusan pengadilan; menyatakan identitas dan latar belakang Anak Didik Pemasyarakatan; pemeriksaan barang-barang atau penggeledahan; pemeriksaan kesehatan; dan pendaftaran pada buku khusus;

b. Penempatan Anak Didik Pemasyarakatan

Data yang diperoleh selanjutnya untuk bahan pertimbangan penempatan kamar Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam penempatan kamar Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi dasar adalah antara lain : jenis kelamin; umur; residivis; kewarganegaraan; jenis kejahatan serta lamanya pidana. Didalam penempatan kamar pada awalnya Anak Didik Pemasyarakatan tidak langsung ditempatkan pada kamar blok Anak Didik Pemasyarakatan, tetapi terlebih dahulu ditempatkan pada kamar khusus (kamar karantina).

c. Pemberian penjelasan hak dan kewajiban Anak Didik Pemasarakatan.

Dalam tahap admisi dan orientasi ini, Anak Didik Pemasarakatan baru diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban Anak Didik Pemasarakatan; pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta pengenalan terhadap lingkungan (orientasi lingkungan). Masa admisi dan orientasi yang diperlukan adalah bervariasi, tetapi sesuai dengan ketentuan paling lama adalah salah satu bulan . Pengalaman selama ini orientasi dilakukan selama 2 (dua) minggu, dengan menempatkan anak pidana di kamar karantina sambil menunggu sidang TPP yang akan menetapkan kamar hunian bagi mereka. Namun apabila Anak Didik Pemasarakatan itu residivis maka masa admisi dan orientasi ini dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan anak pidana baru. Hal ini dilakukan karena biasanya petugas yang mengenali atau mempunyai catatan kepribadian anak yang bersangkutan, sehingga dapat lebih mudah membuat keputusan mengenai penempatan pada suatu kamar hunian yang layak baginya.

Setelah tahap admisi dan orientasi dilalui, maka Anak Didik Pemasarakatan tersebut akan dimasukkan pada blok kamar hunian. Pada tahap ini sudah mulai pada tahap kedua namun masih merupakan tahap dengan “maksimum security”. Pada tahap ini sudah mulai dilaksanakan suatu kegiatan yang meliputi: kegiatan pendaftaran/ absensi; pendidikan umum; pendidikan ketrampilan; pendidikan agama; olahraga dan kesenian; kegiatan sosial; rekreasi; perawatan dan pemberian informasi dari pegawai lembaga ataupun dari media massa.

Untuk memudahkan melaksanakan program kegiatan, maka perlu dibuatkan jadwal agar Anak Didik Pemasarakatan dapat mengetahui dan mempersiapkan diri. Adapun jadwal kegiatan meliputi :senam kesegaran jasmani, kegiatan kerja bakti, pembinaan mental agama, kesenian, olahraga, dan kebersihan kamar. Tentu saja kegiatan tersebut diselingi istirahat dan acara makan.

Program pendidikan bertujuan agar Anak Didik Pemasarakatan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Bentuk program pendidikan ini meliputi pendidikan umum berupa pemasarakatan; kesadaran berbangsa/ bernegara dan penyuluhan hukum. Pendidikan ketrampilan terdiri dari kegiatan menjahit, mencukur dan pertukangan yang melibatkan sebanyak Anak Didik Pemasarakatan selama di dalam Lembaga. Sedangkan bagi mereka yang sudah memperoleh hak asimilasi melakukan kegiatan kerja membuat batako, bidang pertanian dan peternakan di luar lembaga.

Kegiatan pembinaan mental/ agama dilakukan setiap hari dan pada hari jumat. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IA Blitar sangat digalakkan pelaksanaan pembinaan agama bagi Anak Didik Pemasarakatan, dan keaktifan Anak Didik Pemasarakatan di dalam mengikuti kegiatan agama sebagai penilaian yang menonjol dalam proses pembinaan Anak Didik Pemasarakatan . Pemberian ceramah keagamaan serta ibadah lainnya dilakukan sebagai usaha meneguhkan iman dan memberikan pengertian bahwa perbuatan mereka yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang tercela dan harus dijauihi.

Untuk program kesehatan/ perawatan medis dilaksanakan melaui pemberian makanan dengan mempertahankan kadar gizi makanan sehari-hari. Di

samping itu Lembaga ini juga menyediakan poliklinik serta tenaga medis yang selalu siap untuk memeriksa kesehatan Anak Didik.

Guna mengurangi kejenuhan dan sekaligus memelihara kesehatan jasmani dan rohani anak didik, Lembaga juga menyelenggarakan kegiatan olah raga seperti permainan bola voli, sepak takraw, bulu tangkis, dan tenis meja yang dilaksanakan secara rutin. Bagi mereka yang mempunyai minat dan bakat dibidang kesenian, Lembaga juga menyediakan sarana dan prasarana kesenian untuk menyalurkan minat dan bakat anak didik.

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan berupa kegiatan sosial dilaksanakan dengan kunjungan keluarga; kunjungan rohaniwan; kunjungan pengacara dan surat menyurat. Dalam setiap kesempatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan memberikan pengarahan tentang hak hak Anak Didik Pemasyarakatan, yang berupa asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta remisi. Pelaksanaan asimilasi tidak hanya dilakukan diluar lembaga tetapi juga asimilasi di dalam lembaga. Misalnya berbincang-bincang dalam pemberian nasihat oleh pembina dan campur dengan anggota masyarakat di dalam lembaga.

Apabila Anak Didik Pemasyarakatan telah mengikuti program tahap pertama dengan hasil baik, telah menjalani pidana 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain, keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan di tempatkan pada tahap “medium

security”.Selanjutnya apabila proses telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah mencapai cukup kemajuan, baik fisik, materiil serta segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaan diperluas, dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat. Jenis asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul dengan masyarakat umum di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan petugas lembaga dan dengan sesama Anak Didik Pemasyarakatan. Tahap ini dapat dikatakan pada tahap “minimum security”.

Apabila proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka kepada Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan diberikan pembebasan bersyarat, setelah terpenuhi persyaratan baik administratif maupun persyaratan substantif. pembahasan penelitian ini mengenai efektifitas pelaksanaan penjara bagi anak di LPKA kelas I Blitar sebagai berikut;

B. Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Anak di LPKA Kelas I Blitar

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian tentang “apakah pidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar telah dilaksanakan secara efektif sesuai tujuan pidana bagi anak?”, dan “apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pidana bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar?”, maka dalam pembahasan ini akan diuraikan jawabannya secara lebih terperinci.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahan-bahan yang digunakan untuk membahas pokok masalah adalah data sekunder berupa bahan / sumber hukum,

baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pidana penjara dalam rangka integrasi sosial bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Seluruh data Anak Didik Pemasyarakatan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, baik jumlah anak didik pemasyarakatan yang memperoleh remisi, asimilasi, cuti, maupun pembebasan bersyarat dan data yang didapatkan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi yang dilaksanakan di lokasi penelitian.

Konsep pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas I Blitar melalui,

1. Reintegrasi Sosial Sebagai Tujuan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Blitar

Penerapan dan pelaksanaan putusan pengadilan pada dasarnya bertumpu atau memperhitungkan pada tujuan pemidanaan yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan pelanggar / terpidana. Dua kepentingan itu merupakan variabel penting yang diwujudkan dalam kebijakan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkembangan sejarah, tujuan pelaksanaan putusan pengadilan tidak terlepas dari dua kepentingan itu, hanya saja pada tiap dekade, penonjolan itu berbeda – beda.

Tujuan reintegrasi sosial merupakan salah satu bentuk pola kebijakan pelaksanaan putusan pengadilan, di samping pola – pola pelaksanaan putusan pengadilan yang lain, yaitu : pola pengekangan / penutupan; pola penjeratan; pola rehabilitasi terpidana. Pola pengekangan / penutupan bertalian dengan kebijakan pelaksanaan pidana yang sedikit sekali menaruh perhatian kepada kepentingan

terpidana dan juga sedikit sekali menaruh perhatian kepada kepentingan masyarakat. Kebijakan pola ini tidak mengenal strategi perubahan. Pelaksanaan pidana dititik beratkan kepada usaha – usaha penutupan / penyimpanan yang aman (*warehousing*). Pola pengekangan sejalan dengan pembalasan (retribusi) dimana pelanggaran hukum disingkirkan ke tempat – tempat pelaksanaan pidana karena kesalahannya.

Pola penjeraan bertalian dengan kebijakan pelaksanaan pidana yang banyak sekali menaruh perhatian kepada kepentingan masyarakat, akan tetapi sedikit sekali kepada kepentingan pelanggaran. Pelaksanaan pidana menurut pola ini diperkirakan dapat mempunyai pengaruh terhadap masa depan “membuat takut” terpidan untuk mengulangi kejahatan di masa yang akan datang dan sebagai contoh agar orang lain tidak meniru perbuatan jahat. Pola penjeraan sejalan dengan tujuan membuat takut secara khusus maupun secara umum.

Pola rehabilitasi bertalian dengan kebijakan yang banyak sekali menaruh perhatian kepada individu pelanggaran hukum, akan tetapi kurang terhadap kepentingan masyarakat. Sedangkan pola reintegrasi bertalian dengan kebijakan pelaksanaan pidana yang banyak pula kepada kepentingan individu pelanggaran hukum. Perilaku pelanggaran diharapkan dapat berubah setelah yang bersangkutan menghadapi dan mencoba aneka perilaku pengganti yang congruent (sebangun dan serupa) dengan dan keyakinan yang ada pada yang bersangkutan.

Tujuan pola pelaksanaan pidana menurut doktrin reintegrasi sosial sama dengan tujuan pelaksanaan pidana penjara menurut sistem kemasyarakatan, yaitu pemulihan kasatuan hubungan yang eksistensial antara manusia pelanggaran hukum

atau terpidana dengan masyarakatnya. Kebijakan pelaksanaan pidana di Indonesia berdasarkan sistem pemasyarakatan cenderung menganut pola reintegrasi sosial. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan, bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mencapai tujuan reintegrasi sosial tersebut, maka langkah pertama ialah menimba kembali pengetahuan Anak Didik Pemasyarakatan, kemampuan dan motivasinya dan atau merubah sistem nilai yang dianut oleh Anak Didik Pemasyarakatan, dan re-adaptasi sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat bebas. Langkah kedua mengikutsertakan ketiga subyek dalam proses pemasyarakatan (Anak Didik Pemasyarakatan, petugas pembina, masyarakat bebas), dalam proses interaksi. Dengan demikian batasan resosialisasi yang mendekati strategi pemasyarakatan ialah suatu proses interaksi antara Anak Didik Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, masyarakat, ke dalam proses interaksi guna mengubah sistem nilai – nilai anak didik pemasyarakatan, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif melakukan re-adaptasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dari pengertian reintegrasi sosial tersebut nampak bahwa pelaksanaan pidana penjara dalam rangka pemasyarakatan, didalamnya terjadi proses interaksi antara : anak didik pemasyarakatan, petugas pembina dan warga masyarakat.

Sehubungan dengan proses pemasyarakatan anak didik pemasyarakatan dengan mengikutsertakan masyarakat, Bambang Poernomo²⁷ mengemukakan bahwa indikator-indikator pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan adalah dengan cara memperluas upaya *probation*, *assimilation*, *pre-release treatment*, dan serta upaya *after care* yang dikhususkan untuk tindak lebih lanjut masa depan.

Probation dimaksudkan untuk menghindarkan pengaruh buruk dari dalam tembok penjara. *Parole* dimaksudkan untuk menjalani sisa pidana diluar tembok penjara. *Assimilation* dimaksudkan selama menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu dan berkelakuan baik, sambil menunggu habis pidananya diberikan kelonggaran untuk bergaul dengan masyarakat luar dengan atau tanpa pengawasan petugas. *Pre-release treatment* dimaksudkan selama menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu dan berkelakuan baik, dapat diberi ijin untuk tinggal di rumah agar menjelang habis pidananya dapat menyesuaikan dengan lingkungan hidup sekelilingnya. *After care* dimaksudkan memberikan bantuan dan bimbingan yang diperlukan oleh bekas anak didik pemasyarakatan ketika mengalami kesulitan menempuh hidup baru.²⁸

Konsepsi tentang pembinaan terpidana yang dinamakan sistem pemasyarakatan didasarkan pada pokok-pokok pikiran Sahardjo yang disampaikan dalam pidato penerimaan gelar Doktor honoris causa yang berjudul “*Pohon Beringin Pengayom Pancasila*” pada tanggal 5 juli 1963 di Universitas Indonesia Jakarta. Pokok-pokok pikiran tersebut, ditindaklanjuti dengan konferensi para pimpinan jawatan kepenjaraan pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 di Lembang Bandung. Konferensi tersebut menyetujui konsepsi pembinaan

anak didik pemasyarakatan yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Konsepsi dasar tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan yang dikenal dengan “prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan”²⁹. Adapun rumusan prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa financial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap anak didik pemasyarakatan tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan
3. Tobat tidak hanya dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada anak didik pemasyarakatan harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya dimasa lampau. Anak didik pemasyarakatan dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu diadakan pemisahan antara :

- a. Residivis dan yang bukan;
 - b. Anak didik pemasyarakatan yang telah melakukan pidana berat dan yang ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak nakal;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Anak Didik Pemasyarakatan harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasing daripadanya. Menurut paham lama pada waktu menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara kultural. Secara bertahap mereka akan dibimbing ditengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang community centered dan berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner approach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan Anak Didik Pemasyarakatan.
 6. Pekerjaan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena mana harus ada integrasi pekerjaan Anak Didik Pemasyarakatan dengan pembangunan nasional.
 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam pancasila, karena

Anak Didik Pemasyarakatan harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, jiwa bermusyawarah untuk mufakat yang positif. Anak Didik Pemasyarakatan harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditujukan kepada Anak Didik Pemasyarakatan bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
9. Anak Didik Pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar Anak Didik Pemasyarakatan mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara yang didukung dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan menunjukan, bahwa sudah nampak adanya usaha pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Dikatakan adanya pembinaan karena didalamnya terkandung suatu usaha untuk mendidik Anak Didik Pemasyarakatan dengan cara

memberi bekal hidup sehingga mempunyai kemampuan dan kemauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik dan tidak melanggar hukum lagi, serta berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam pemasyarakatan jelas, bahwa pemasyarakatan menolak prinsip *retributive* dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat *rehabilitative-reformatif*, dengan tujuan utama mencegah pengulangan pelanggaran hukum; aktif produktif serta berguna bagi masyarakat dan mampu bahagia didunia dan diakhirat.³⁰ Konsep pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yang menurut Bambang Poernomo diartikan sebagai kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap Anak Didik Pemasyarakatan gara hasil pembinaan menjadi manusia sesuai dengan *gotro* dan *werdinya* masyarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diartikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Gagasan dan realisasi pembaharuan pidana penjara yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan merupakan ciri khas Indonesia,

yakni berlandaskan ideologi dan falsafah pancasila yang mengandung dasar pengayoman baik terhadap individu maupun masyarakat.

2. Pelaksanaan Pidana dalam rangka Reintegrasi Sosial Anak Didik Pemasyarakatan

Pelaksanaan putusan pengadilan pidana pada dasarnya bertumpu pada tujuan pemidanaan yang harus diperhitungkan yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan pelanggar / terpidana. Dua kepentingan itu merupakan variabel penting yang harus diwujudkan dalam kebijakan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkembangan sejarah pelaksanaan putusan pengadilan tidak lepas dari dua kepentingan itu, hanya saja pada tiap dekade penonjolan itu berbeda-beda.

Ada empat jenis pola kebijakan yang dapat dikemukakan, sehubungan dengan penonjolan tujuan pemidanaan itu yang mengakibatkan masing-masing dengan setrategi yang berbeda. Adapun empat pola kebijakan pelaksanaan putusan pengadilan pidana³³, adalah sebagai berikut :

1. Pola pengekangan / penutupan;
2. Pola penjeraan;
3. Pola rehabilitasi;
4. Pola Re-integrasi Sosial.

Dengan melihat pola-pola kebijakan pelaksanaan putusan pidana tersebut, maka di Indonesia telah melaksanakan pola pelaksanaan pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan, termasuk menganut pola reintegrasi sosial. Menurut sistem pemasyarakatan tujuan pembinaan terpidana adalah memulihkan terpidana kepada kesatuan hubungan eksistensial antara terpidana dengan

masyarakatnya. Tugas utama instansi pemasyarakatan untuk memulihkan kastuan hubungan itu dalam keadaan yang lebih baik, lebih kokoh dari semula sehingga diharapkan kesatuan hubungan itu tidak mudah menjadi retak.

Proses pemasyarakatan adalah suatu proses sejak seseorang Anak Didik Pemasyarakatan / anak didik masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas yang sesungguhnya kembali ke tengah-tengah masyarakat.³⁴ Kegiatan tersebut dimulai dari sejak yang bersangkutan masih berstatus sebagai tersangka / terdakwa, dengan cara mengumpulkan data pribadi yang bersangkutan (*presentence report*) atau penelitian kemasyarakatan.

Proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Proses Pemasyarakatan ditinjau dari aspek Pengamanan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pengamanan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan pengamanan yang ditentukan menurut durasi waktu mulai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan tergantung sikap perilaku Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani pidananya. Pengamanan Anak Didik Pemasyarakatan dibagi dalam empat tahapan :

- a. Tahap pertama; *maximum security* (keamanan maximum), sampai batas 1/3 (sepertiga) dari masa pidana yang sebenarnya;
- b. Tahap kedua; *medium security* (keamanan medium), sampai batas ½ dari masa pidana yang sebenarnya;

- c. Tahap minimum *security* (keamanan minimum) sampai 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana sebenarnya;
- d. Tahap keempat; *integrasi*, dari selesainya 2/3 masa pidana yang sebenarnya sampai habis pidananya.

Tahap *Maximum Security*, penjagaan keamanan Anak Didik Pemasyarakatan pada tahap ini dilakukan dengan ketat, khususnya terhadap penempatan Anak Didik Pemasyarakatan yang dikategorikan berbahaya, seperti Anak Didik Pemasyarakatan yang dipidana karena kasus pembunuhan, penyalahgunaan narkotika dan sebagainya. Pengawasan ketat semacam itu dilaksanakan sampai 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahapan ini Anak Didik Pemasyarakatan melalui tahapan admisi dan orientasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Tahapan admisi adalah prosedur yang pertama-tama harus dilalui oleh terpidana yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, yakni sejak memasuki pintu lembaga, pengeledahan, pemeriksaan kesehatan, pendaftaran, pembuatan sidik jari, pemotretan sampai memasuki prosedur orientasi. Sedangkan tahap orientasi adalah prosedur setelah admisi, dimulai dari penjelasan tentang peraturan tata tertib dan disiplin yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, program kerja dalam rangka pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, tata cara dan prosedur pengajuan keluhan, hak-hak dan kewajiban Anak Didik Pemasyarakatan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang menjadi wali dan kunjungan keluarga ke Lembaga Pemasyarakatan sampai pencarian data sosial maupun bakatnya untuk menyusun program pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan.

Pada tahap ini diikuti pula dengan melakukan penelitian terhadap Anak Didik Pemasyarakatan guna mengetahui segala hal yang berkaitan dengan dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan. Disamping itu pula dilakukan pula penelitian guna memperoleh keterangan tentang dirinya dari pihak keluarga, bekas majikan atau atasannya ia bekerja, teman sekerja, sikorban dari perbuatannya, serta dari instansi lain yang menangani perkaranya.

Tahap *Medium Security*, Pengawasan Anak Didik Pemasyarakatan pada tahap ini tidak seketat pada tahap keamanan maksimum. Pada tahapan ini Anak Didik Pemasyarakatan telah menjalani 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Kebebasan diberikan dengan memberikan kesempatan kepada Anak Didik Pemasyarakatan untuk melakukan olahraga, bekerja diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan / pengawalan petugas Pemasyarakatan. Kebebasan tersebut diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan apabila dipertimbangkan yang bersangkutan sudah menunjukkan keinsyafan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.

Tahap *Minimum Security*, Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan yang menurut pertimbangan telah mencapai kemajuan baik fisik, mental maupun keterampilannya karena proses pembinaan diperluas dan bergeser ke tahapan asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Anak Didik Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi merupakan hubungan antara Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat. Oleh karena itu tahap ketiga sampai pada

tahap mengadakan hubungan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat disebut juga dengan tahap asimilasi.

Tahap Integrasi; Tahap integrasi dilaksanakan apabila Anak Didik Pemasyarakatan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana seluruhnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Disamping itu apabila Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kepadanya dapat pula diberikan cuti menjelang bebas atau *pre realese treatment*. Cuti menjelang bebas lamanya sama dengan remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari enam bulan.

2. Proses Pemasyarakatan ditinjau dari aspek Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan, mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus Anak Didik Pemasyarakatan untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, maka sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Anak Didik Pemasyarakatan, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Dalam tataran praktis, melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan, bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Didik Pemasyarakatan”.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan 3 (tiga) program pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan, meliputi :

- a. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- b. Program pembinaan diperuntukan bagi Anak Didik Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan; dan
- c. Program pembimbingan diperuntukan bagi klien.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pembinaan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja serta produksi. Adapun program pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, yaitu :

- a. Tahap awal pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan meliputi masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian

dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

- b. Tahap lanjutan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan meliputi : perencanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Tahap terakhir pembinaan Anak Didik Pemasarakatan meliputi; perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) berdasarkan data yang diperoleh dari pembina Pemasarakatan, pengamanan Pemasarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan dan wali anak pidana.

Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan juga menyangkut pemberian hak-hak mereka menurut peraturan yang berlaku. Hak-hak tersebut harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Lembaga Pemasarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1) mengemukakan hak-hak Anak Didik Pemasarakatan, yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan kebebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu strategi pembinaan terpidana menurut sistem pemasyarakatan dalam rangka mempersiapkan terpidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum, mandiri dan produktif di masyarakat dilaksanakan dengan program pelaksanaan pemberian hak-hak asimilasi dan cuti menjelang bebas. Hak-hak yang diperoleh Anak Didik Pemasyarakatan selama dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya diatur dalam peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan beserta peraturan pendukungnya. Adapun hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan, antara lain :

- a. Hak untuk memperoleh Remisi;

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Remisi adalah pengurangan menjalani pidana yang diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Remisi, disebutkan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Pasal 2 menjelaskan remisi terdiri atas :

- 1) Remisi umum yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Bagi Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan besarnya remisi 1 (satu) bulan, bagi yang telah menjalani pidana 12 bulan atau lebih berhak memperoleh remisi 2 (dua) bulan, pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan, pada tahun ke empat dan kelima diberikan remisi 5 (lima) bulan dan pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
- 2) Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Besarnya

remisi khusus adalah 15 (lima belas) hari bagi Anak Didik Pemasarakatan dan anak pidana yang telah menjalani 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, 1 (satu) bulan bagi yang telah menjalani pidana 12 (dua belas) bulan sampai tahun ketiga, pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

- 3) Remisi tambahan yang diberikan kepada Anak Didik Pemasarakatan dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Besarnya remisi tambahan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Anak Didik Pemasarakatan dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan; dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Anak Didik Pemasarakatan dan anak pidana yang telah membantu kegiatan Pembinaan di lembaga Pemasarakatan.

b. Hak untuk memperoleh cuti

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pasal 41 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap Anak Didik Pemasarakatan dan anak pidana dapat diberikan cuti, berupa cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Cuti adalah bentuk pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dan anak pidana meninggalkan Lembaga Pemasarakatan untuk sementara waktu,

apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Cuti mengunjungi keluarga adalah pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya, antara lain kediaman istri, anak kandung atau angkat atau tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri, atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. Cuti dapat diberikan paling lama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) yang ijinnya diberikan oleh Kepala lembaga Pemasyarakatan dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana guna memperoleh cuti menjelang bebas sebagaimana syarat-syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04-10 tahun 1999. tanggal 2 februari 1999 tentang asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.

c. Hak untuk memperoleh Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana didalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu bekerja diluar Lembaga Pemasyarakatan, seperti bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah,

swasta maupun perorangan, bekerja mandiri atau bekerja pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan tahap security minimum. Disamping itu asimilasi dapat pula dimanfaatkan untuk mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan serta mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya. Lamanya waktu yang digunakan asimilasi disesuaikan jenis kegiatan yang diikuti yang pelaksanaannya dibawah tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Sehubungan dengan adanya kebijakan dalam proses pembinaan dengan tahapan-tahapan menurut sistem pemasyarakatan tersebut, maka sistem pemasyarakatan cenderung menggunakan metode progresif. Artinya kehidupan Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana diatur sedemikian rupa dalam bentuk tahapan-tahapan kehidupan, dimulai dari tahap yang terendah sampai tahap yang tertinggi. *Kedua*; ukuran evaluasi perkembangan pribadi Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana menggunakan ukuran “kelakuan baik” (*good behavior*), maka dalam hal ini sistem pemasyarakatan mempergunakan pendekatan rehabilitative. *Ketiga*; penilaian kelakuan baik nampak diutamakan, tetapi jangka waktu pemidanaan (*time sentence*) nampak lebih dominan didalam menentukan Anak Didik Pemasyarakatan dan anak pidana akan dibebaskan. *Keempat*; dalam sistem pemasyarakatan nampak usaha-usaha kearah mengikutsertakan pihak masyarakat.

C. Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Narapidana anak yang masuk LPKA kelas I Blitar ini berasal dari seluruh wilayah Jawa Timur, pada umumnya narapidana anak yang berada di tempat tersebut masih masuk usia sekolah. Fokus Program LPKA kelas I Blitar memberikan pelayanan yang utama dalam hal pembinaan, tujuannya supaya kebutuhan dan hak narapidana sebagai warga negara dapat terpenuhi secara baik, walaupun mereka dalam kondisi menjalani masa hukuman dengan menyandang status tahanan. Guna mendukung kegiatan pembinaan di LPKA diadakan berbagai jenis kegiatan untuk melatih ketrampilan dan pendidikan mereka, antara lain: kegiatan membuat ketrampilan sandal batik, pelatihan kerja dibidang perkebunan, pelatihan dibidang pertanian, kursus menjahit, perikanan, musik, karawitan, disamping kejar paket sebagai gantinya sekolah formal yang menjadi kegiatan utama. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Samiaji yang menyatakan bahwa “Kegiatan ketrampilan kerja meliputi kerajinan sandal dan tumpal, peternakan, perikanan, karawitan, perkebunan, pertanian serta musik”. Kegiatan pendidikan nonformal yang ada di LPKA ini terdiri dari berbagai macam jenis antara lain kejar paket, kursus menjahit, ketrampilan membuat sandal, pelatihan pertanian, pelatihan peternakan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar dalam mewujudkan tujuan proses pelaksanaan pemidanaan telah melaksanakan berbagai program utama pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian (kewirausahaan). Berdasarkan pada peraturan Pasal 3 PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,

pembinaan, pembimbingan kepribadian dan kemandirian, meliputi beberapa hal antara lain : (a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) Kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Intelektual, (d) Sikap dan perilaku, (e) Kesehatan jasmani dan rohani, (f) Kesadaran hukum, (g) Reintegrasi sehat dengan masyarakat, (h) Keterampilan kerja; dan (i) Latihan kerja dan produksi.

Pembinaan kemandirian (kewirausahaan) bertujuan menjadikan Anak Didik LPKA yang terampil dan melatih kerja seperti ketrampilan sandal batik, pelatihan kerja dibidang perkebunan, pelatihan dibidang pertanian, khursus menjahit, pelatihan perikanan serta berkesenian musik dan karawitan.⁷⁶ Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan pada Pasal 2 ayat (1) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah Pasal 7 ayat (2) PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, tahapan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA meliputi: (1) Tahapan Pembinaan Awal, adalah pembinaan yang dimulai sejak berstatus Anak Didik Pemasyarakatan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana, (2) Tahapan Pembinaan Lanjutan, pembinaan lanjutan terdiri atas: (a) Tahap lanjutan pertama, pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan awal selesai dilaksanakan sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, (b) Tahap lanjutan kedua, pembinaan ini dimulai sejak tahap pembinaan lanjutan pertama telah selesai dilaksanakan sampai dengan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana, dan (3) Tahapan Pembinaan Akhir, adalah pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua yaitu telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. LPKA Kelas

⁷⁶ Gayatri Rachmi Rilowati, Amd. IP, SH , *wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Blitar , Wawancara Pribadi, Blitar , 2 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

I A Blitar dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan pemidanaan telah melaksanakan program pembinaan dengan mengadakan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait di Kabupaten Blitar dan propinsi Jawa Timur.

Program Pembinaan yang telah dilaksanakan oleh LPKA Kelas I A Blitar antara lain: (1) Kegiatan keagamaan, (2) Kegiatan belajar mengajar, (3) Kegiatan ketrampilan, dan (4) Pelayanan makanan. Kegiatan program pembinaan utama terhadap Anak Didik Pemasyarakatan tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Blitar dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan dan sistematis. Tujuan kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan dan sistematis supaya Anak Didik Pemasyarakatan terbiasa dengan kegiatan yang dilaksanakannya sehari-hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak I A Blitar sehingga dapat diaplikasikan setelah kembali ke masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari petugas yaitu ibu Gayatri menjelaskan bahwa “Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Blitar dalam Mewujudkan Keberhasilan Tujuan pelaksanaan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar diketahui dari terwujudnya tujuan akhir pemidanaan yaitu keberhasilan pembinaan yang telah dilaksanakan (secara kualitatif) dan besaran presentase Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar (secara kuantitatif). Jika dilihat secara kualitatif Lembaga Pembinaan Khusus Anak I A Blitar sudah dapat mewujudkan tujuan pemidanaan karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar sudah melaksanakan pembinaan.

Beliau menambahkan, secara kuantitatif bahwa keberhasilan pembinaan jika diukur secara kuantitatif (angka) susah”.⁷⁷

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan, bapak Sapto Isnugroho dimana beliau menjelaskan bahwa program utama pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Blitar yaitu pembinaan kepribadian untuk anak pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan Anak Didik Pemasyarakatan yang memiliki kepribadian serta akhlak baik dan terpuji sehingga pada saat kembali kemasyarakatan dapat berguna bagi lingkungan, bangsa, dan agama. Sedangkan, pembinaan kemandirian (kewirausahaan) yang bertujuan untuk menciptakan Anak Didik Pemasyarakatan terampil dan terlatih dalam bekerja dalam bidang peternakan, pertanian, perkebunan serta berkesenian musik, melukis dan karawitan. Itulah beberapa contoh pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Blitar .

Keberhasilan pembinaan anak didik di LPKA jika hanya dilihat secara kualitatif dirasa kurang. Maksudnya, jika hanya terdapat satu sumber atau data yang menjadi rujukan, maka akan sangat sulit dalam pengambilan kesimpulan akan kevalidan data mengenai hal tersebut. Diperlukan pula data secara kuantitatif berupa jumlah prosentase Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA yang menjadi residivis. Jika presentase Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis rendah maka dapat dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah berhasil dan

⁷⁷ Gayatri Rachmi Rilowati, Amd. IP, SH, *wawancara*, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LPKA Blitar , Wawancara Pribadi, Blitar , 2 Mei 2018, pukul 13.00 WIB.

sebaliknya jika presentase anak residivis tinggi maka dikatakan pembinaan yang dilaksanakan telah gagal.⁷⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan data jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang menjadi residivis selama kurun waktu 12 bulan, yaitu dari bulan Agustus 2017 sampai Juli 2018 sebanyak 10 (enam) orang. Selain itu, penulis juga mendapatkan data jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Blitar

Tuntutan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar dalam melaksanakan tugas mereka harus bisa berperan selayaknya orang tua kepada anak didik pemasyarakatan tanpa kekerasan dan diskriminatif dalam mendidik seperti perilaku orangtua kepada anaknya sendiri. Dalam proses pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar juga menghadapi beberapa kendala. Kendala yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Faktor Anak Didik Pemasyarakatan itu sendiri, pemberian pembinaan kepada Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan agar Anak Didik Pemasyarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya mejadi lebih baik. Pembinaan tersebut tidak sedikit Anak Didik Pemasyarakatan yang bermalas-malasan dalam melakukan program pembinaan yang sudah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar . Sapto Isnugroho, menyatakan bahwa kendala dalam membina Anak Didik Pemasyarakatan ketika si Anak Didik tersebut malas.⁷⁹ Hal inilah yang menjadi hal utama kenapa para petugas pembinaan harus memiliki

⁷⁸ Sapto Isnugroho, S. Pd, *wawancara*, Kepala Seksi Pengawas dan Penegakan Disiplin LPKA Blitar ,Wawancara Pribadi, Blitar , 10 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

⁷⁹ Sapto Isnugroho, S. Pd, Kepala Seksi Pengawas dan Penegakan Disiplin LPKA Blitar ,*Wawancara Pribadi*, Blitar , 10 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

pengetahuan yang baik tentang psikologi tentunya agar para petugas pembinaan mengetahui seperti apa karakter Anak Didiknya sehingga petugas pembinaan mengerti bagaimana cara membina Anak Didik Pemasarakatan yang bermalas-malasan dengan mengetahui karakter diri Anak Didik Pemasarakatan tersebut.

2. Faktor Sarana dan Prasarana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak klas 1 Blitar kurang mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai padahal untuk menciptakan suasana pembinaan yang kondusif diperlukan sarana dan prasarana yang representatif dan dapat menampung jumlah anak didik pemsarakatan yang ditampung. Tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada kendala yang sering muncul, seperti yang diutarakan Gayatri Rachmi Rilowati oleh bahwa sarana dan prasarana memang terbatas tetapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar tetap berusaha mengoptimalkan yang ada walaupun sangat minim sarana dan prasarananya.⁸⁰ Selain itu, menurut Anak Didik Pemasarakatan Biasa yang berinisial LAS, bahwa sudah sekitar dua bulan sirkulasi udara kurang (pintu sel dibuka pada pagi hari) sehingga udara pagi dan sinar matahari pada pagi hari kurang, sel yang lembab sehingga menyebabkan gatal-gatal, lahan jemuran kurang luas dan sarana olah raga kurang memadai.⁸¹
3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar

⁸⁰ Gayatri Rachmi Rilowati, Amd. IP, SH, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik LPKA Blitar, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 2 Mei 2018, pukul 13.00 WIB.

⁸¹ LAS, Anak Didik Pemasarakatan Biasa LPKA Blitar, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 2 mei 2018, pukul 15.45 WIB.

juga sangat mementingkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Menurut pernyataan Gayatri Rachmi Rilowati , bahwa di bagian SDM yaitu petugas pembinaan yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya karena petugas di LPKA Blitar itu belum mengerti apa arti dari pembinaan. Petugas di LPKA Blitar harus mendapatkan pelatihan-pelatihan sehingga ilmu petugas LPKA Blitar terus bertambah karena yang dididik manusia yang terus berkembang. Jadi, petugas pembinaannya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi.⁸²

4. Faktor masyarakat. Komponen yang paling penting menentukan keberhasilan pembinaan anak pemsyarakatan adalah Masyarakat. Masyarakat harus memberikan pembinaan yang baik dengan tidak mengucilkan dan memeberikan perhatian khusus terhadap Anak Didik Pemsyarakatan yang sudah keluar dari Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas I A Blitar karena Anak Didik Pemsyarakatan yang sudah keluar bukan lagi tanggung jawab Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas I A Blitar. Menurut Anak Didik Pemsyarakatan Residivis yang berinisial ISJ, bahwa telah menjadi residivis sebanyak empat kali yang semuanya disebabkan karena pergaulan.⁸³ Hal serupa juga terjadi kepada Anak Didik Pemsyarakatan Residivis yang berinisial ISJ, bahwa telah menjadi residivis sebanyak empat kali yang semuanya disebabkan karena pengaruh teman (pergaulan). Anak Didik Pemsyarakatan yang sudah keluar tergantung dari pergaulan atau didikan dari orang tua dan masyarakat tersebut, apabila pergaulan dan didikan yang didapat

⁸²Gayatri R Rilowati, Amd. IP, SH, Kasi Bimbingan Narapidana / Anak Didik LPKA Kelas I Blitar , *Wawancara Pribadi*, Blitar , 7 Mei 2018, pukul 13.00 WIB.

⁸³ ISJ, Anak Didik Pemsyarakatan Residivis LPKA Kelas IBlitar , *Wawancara Pribadi*, Blitar , 7 Mei 2018, pukul 15.15 WIB.

buruk maka tidak menutup kemungkinan Anak tersebut akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan motivasi hidup yang lebih baik.

Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di atur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dalam Pasal 5, adapun sistem pembinaan anak pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut: pembimbingan, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pengayoman, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak untuk dapat tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Dari pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis dampak dari pembinaan yang telah di laksanakan oleh LPKA yang didukung oleh para petugas tampaknya belum mencapai keefektifitasnya atau tujuan-tujuan dari pembinaan anak didik pemasyarkatan. Bahkan untuk mencapai tujuan utama dari pemedanaan bagi anak didik pemasyarkatan, yaitu salah satunya dampak memberikan efek jera atau tidak akan mengulangi perbuatan yang telah di lakukannya, sehingga pelaku pelanggaran tindak pidana atau narapidana tidak menjadi residivis akan tetapi supaya memperbaiki diri dengan sendirinya. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarkatan tidak dapat terlaksana secara efektif tanpa melalui 4 (empat) tahapan proses pembinaan yang telah ditentukan sebagai berikut ⁷⁷ :

- a. Tahap pertama, Terhadap setiap anak didik pemasyarakatan yang masuk lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya, bahkan juga mengenai sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang menangani perkaranya
- b. Tahap kedua, proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LPKA yang *medium security*.
- c. Tahap ketiga, proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan telah dijalani 1/2 dari masa hukuman pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi ketrampilan, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain: ikut beribadah dengan masyarakat luar; mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaanya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

d. Tahap keempat, proses pembinaannya anak didik pemasyarakatan telah dijalani 2/3 dari masa hukuman pidana yang sebenarnya atau sekurangnya 9 bulan, maka kepada anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan dapat diberikan pembebasan bersyarat dan pengusulan bebas bersyarat ini ditetapkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan.

Efektivitas pidana penjara ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat, dampak yang di harapkan antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi, memasyarakatkan kembali si pelaku (Asimilasi) dan melindunginya dari diskriminasi dan perlakuan sewenang-wenangan di luar hukum.⁷⁸

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Didik Pemasyarakatan.⁷⁹ Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (Rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan akhirnya hingga di bina dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. anak didik pemasyarakatan yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di LPKA. Terhadap anak didik pemasyarakatan, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya.

Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LPKA dan pengawasannya maksimum (*maximum security*). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan. Bahwasanya pola pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang bersifat interaktif antara komponen anak didik pemasyarakatan, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan,

tujuan sistem pembinaan anak didik pemsyarkatan melalui upaya reintegrasi anak didik pemsyarkatan dengan masyarakat tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan. Dalam rangka memperkaya pola pembinaan, sepatutnya petugas LPKA harus dibekali pengetahuan dan pelatihan yang berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pola pembinaan dan mengetahui secara detail sifat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak didik pemsyarkatan, sehingga semua program kegiatan pembinaan yang diberikan kepada para anak didik pemsyarkatan yang menjalani masa pidana penjara baik yang masa hukumannya lama dan singkat akan mencapai tujuan pemsyarkatan yaitu mencegah anak didik pemsyarkatan menjadi residivis.

Tugas penting Dewan Pembinaan Pemsyarkatan (D.P.P) memegang peranan utama untuk melaksanakan baik itu perencanaan dan pelaksanaan proses pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan selama anak didik pemsyarkatan di dalam lembaga ataupun di luar lembaga, sesuai dengan peraturan yaitu Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 dan Surat Edaran Dirjen. B. T. W. No. DDP. 2.2/10/5 tanggal 5 April 1970 jo. Surat Edaran Kepala Direktorat Pemsyarkatan No. KP. 10.13./3/1 tanggal 8 Februari 1965. Adapaun hal yang mengatur mengenai dewan pembinaan pemsyarkatan ada pada Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 itu menentukan susunan Direktorat Pemsyarkatan dan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan. Sejak berlakunya Keputusan Presiden tersebut,

mulailah LPKA bertugas ganda yang tidak dapat dibatasi dan dibedakan secara terpisah antara tugas pembinaan dan tugas bimbingan. Salah satu faktor yang tidak tercapainya keefektifan pembinaan di dalam LPKA dikarenakan masalah seperti Pembinaan didalam lembaga seharusnya sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan diluar lembaga, namun dalam praktek pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas kurang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar, adapun data yang diperoleh mengenai keterangan bahwa dengan tidak terimplementasinya 10 prinsip pemasyarakatan dan juga tidak tuntasnya pelaksanaan tahapan-tahapan pembinaan yang ada maka tujuan pembinaan terhadap anak didik pemasyarkatan cenderung tidak tercapai dengan kata lain pembinaan yang dilakukan menjadi tidak efektif.⁸¹

Kepala Lembaga Pemasyarakatan menegaskan bahwa para petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar , telah melaksanakan program pembinaan yang diberikan terhadap anak didik pemasyarkatan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, hanya saja efektivitas pembinaan tersebut belum tercapai sesuai tujuan pembinaan untuk memberikan efek jera kepada anak didik pemasyarkatan setelah menyelesaikan masa pidananya, hal tersebut diketahui dari data yang diperoleh ternyata masih ada anak didik pemasyarkatan yang menjadi residivis. Beberapa anak didik pemasyarkatan Selain tidak efektif, berdasarkan data tersebut di atas tampak pula bahwa pembinaan di LPKA menimbulkan

implikasi negatif bagi si anak didik pemasyarakatan. Sisi negatifnya antara lain tampak bahwa para eks anak didik pemasyarakatan juga tetap mendapat penilaian yang buruk di mata masyarakat setelah lepas atau selesai menjalani masa pidananya. Dari fakta yang didasarkan hasil penelitian tampak bahwa sisi negatif yang muncul adalah penularan perilaku buruk dari para anak didik pemasyarakatan (antar warga binaan) terutama mereka anak didik pemasyarakatan yang menjalani masa pidana pendek, hal tersebut dikarenakan ada pencampuran antara narapidana anak dengan dewasa sehingga memicu penularan pengaruh buruk. Selama masa pembinaan di dalam lembaga dan pembinaan di masyarakat kepada setiap narapidana yang mengalami pidana lebih dari 3 (tiga) bulan dapat diberikan dorongan berupa upaya remisi untuk memperpendek masa pidana, apabila telah menunjukkan prestasi dengan berbuat dan berkelakuan yang baik atau turut mengambil bagian berbakti terhadap negara.

Tujuan pembinaan walau saat ini tidak dirumuskan dalam ketentuan normatif, namun terdapat tolak ukur dan dasar pembenaran dalam membahas pidana penjara yang bersifat teoritis, khususnya dilihat dari sudut politik kriminal. Tujuan politik kriminal selama ini adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai keamana dan kesejahteraan masyarakat”. Perbaikan pada diri si anak didik pemasyarakatan, maka diharapkan anak didik pemasyarakatan tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya atau tidak menjadi residivis.

Bertolak dari hal ini diatas maka sering pula dikatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan perilaku kejahatan (*recidive*). Untuk Menjaga keamanantindakan yang dilakukan umumnya

adalah terdiri dari menjaga anak didik pemsyarkatan terkunci, dihitung, dan dikontrol sementara memungkinkan untuk saat terisolasi dari kegiatan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan anak didik pemsyarkatan selama terisolasi berupa kegiatan rekreasi terbatas, pendidikan dan konseling. Sayangnya, kesejahteraan dan kebebasan psikologis dari anak didik pemsyarkatan tidak tergantung pada berapa banyak pendidikan, rekreasi, dan konseling yang ia terima melainkan, bagaimana dia bisa hidup dan berhubungan dengan anak didik pemsyarkatan lain yang merupakan hal penting. Karena pada akhirnya tidak ada efek jera pada para anak didik pemsyarkatan dengan adanya pidana penjara, walaupun memang ada anak didik pemsyarkatan yang merasa jera melakukan tindak pidana, yang lebih tepatnya mereka hanya merasa “malu” mempunyai cap atau *stigma* bahwa mereka adalah mantan narapidana.

Dimana ada beberapa narapidana yang masih beranggapan bahwa tindak pidana yang mereka lakukan lebih baik dibandingkan para narapidana jangka panjang karena memang dilihat dari segi jenis tindak pidananya, narapidana yang di jatuhi masa pidana penjara jangka pendek adalah mereka yang melanggar tindak pidana ringan, seperti pencurian dan perjudian, lain halnya dengan narapidana jangka panjang yang biasanya melanggar perbuatan pidana yang dianggap jauh lebih memalukan dan merugikan korbannya, seperti tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan.

Salah satu masalah yang timbul adalah sifat anak didik pemsyarkatan yang tidak terlalu sensitif menganggap bahwa pembinaan selama masa pidana penjara pendek hanya sebagai pengisi waktu luang atau masa istirahat setelah

banyak melakukan banyak pekerjaan saat di luar penjara. Jadi ada kemungkinan mereka dapat melakukan perbuatan pidana lagi setelah keluar penjara dan telah selesai masa pidananya. Bagi narapidana yang sensitif, pidana penjara pendek tetap membawa efek jera, terutama bagi keadaan psikisnya, karena pasti ada penilaian yang buruk di mata masyarakat setelah lepas atau selesai menjalani masa pidananya disebut juga sebagai *stigmatisasi*. Sekalipun pidana penjara tersebut berjangka pendek, maka justru akan sangat merugikan, sebab di samping kemungkinan terjadi hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, maka pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi anak didik pemsyarkatan di satu pihak, dan di lain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut *stigma* atau cap jahat. Stigmatisasi ini pada dasarnya akan menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Suatu kejahatan seseorang secara resmi dipidana, sehingga kehilangan masa sekolah di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigmatisasi menyingkirkannya dari lingkungan orang-orang yang benar. Stigma meningkatkan sanksi negatif dan sanksi negatif tersebut memperkuat *stigma*.

Pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarkatan di Lembaga Pemsyarkatan khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar terdapat beberapa hambatan atau faktor-faktor lainnya yang mengakibatkan tidak efektifnya tujuan pemidanaan. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa pendapat para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Blitar serta anak didik pemsyarkatan sebagai responden tentang hal-hal apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarkatan selama

masa pidana berlangsung. Hal itu terlihat dari pendapat Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik menyatakan bahwa adanya pembinaan terhadap warga binaan masa pidana pendek sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan program pembinaan yang ada khusus terhadap anak didik pemsyarkatan. Singkatnya waktu pembinaan, mereka hanya mengikuti beberapa tahapan saja, misalnya : Admisi Orientasi, Maksimum Sekuriti, Medium Sekuriti dan Minimum Sekuriti, dan tidak melewati tahap Asimilasi, sesuai peraturan yang telah ada dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, di mana tahap Asimilasi merupakan salah satu tahap yang harus dijalani untuk mengembalikan narapidana kedalam lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik.

Kurangnya peran serta Pemerintah Daerah terhadap perkembangan pembinaan anak didik pemsyarkatan di LPKA, serta belum adanya landasan hukum yang khusus tentang pembinaan anak didik pemsyarkatan dapat menimbulkan tidak adanya program yang pasti bagi petugas dalam melaksanakan program pembinaan. Petugas berpendapat bahwa singkatnya waktu pidana mereka menjadi alasan mereka sedikit merasa malas untuk mengikuti semua kegiatan dengan lebih serius yang di berikan petugas, walaupun sebenarnya mereka mengerti bahwa semua kegiatan yang diberikan adalah kegiatan positif yang dimaksudkan sebagai bekal mereka agar mereka menjadi orang yang lebih baik lagi dan dapat diterima oleh masyarakat saat masa pidananya telah selesai. Pendapat senada dengan warga binaan tersebut dinyatakan pula oleh Gayatri Rachmi Rilowati, Amd. IP, SH, bahwa ada anak

didik pemasyarakatan yang malas mendengarkan pengarahan dari petugas karena mereka tahu hukuman mereka hanya singkat, disamping itu ada hambatan lainnya, yaitu kapasitas bangunan LPKA tidak memadai untuk mengikuti prosedur pembinaan yang benar-benar memenuhi mutu standar yang efektif bagi anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan pendapat responden yang telah di himpun oleh penulis, maka dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor penghambat pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar dapatlah dikelompokkan menjadi dua antara lain yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, meliputi petugas yang masih kurang dalam segi kuantitas serta kualitas proses pendekatan pembinaan, waktu yang terlalu singkat dalam proses pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan yang memiliki masa hukuman jangka pendek, belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus untuk pengaturan program pembinaan anak yang menjadi narapidana secara terperinci, serta bangunan yang kurang memadai untuk memisahkan anak didik pemasyarakatan dengan pidana pendek dengan anak didik pemasyarakatan yang menjalani pidana penjara lebih lama, serta pemisahan narapidana anak dengan dewasa.

Faktor eksternal yakni kurangnya kesadaran pada diri anak didik pemasyarakatan untuk memanfaatkan pembinaan yang diberikan selama masa pidana dengan lebih serius, serta kurangnya dukungan dari pihak keluarga anak didik pemasyarakatan serta instansi terkait yang seharusnya turut berpartisipasi dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Masalah pokok dari efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat terkait dengan pembedaan anak sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama harus mempunyai cukup kejelasan mengenai makna dan arti ketentuan, seharusnya tidak boleh adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya yang terperinci, peraturan tersebut seharusnya sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya dalam menginterpretasi hukum di dalam pandangan masyarakat. Seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai pola pembinaan yang bersifat umum ternyata tidak memiliki pengaruh yang efektif untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana khususnya bagi narapidana anak.

b. Faktor pembina Lembaga pemasyarakatan

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksanaan hukum merupakan dua hal yang berbeda dimana masalah hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang bentuk abstrak, sebaliknya pelaksanaan hukum merupakan suatu yang bentuk konkret dan nyata. Penghubung antara dua hal yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah aparatur penegak hukum. Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang

seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. tidak efektif untuk mencapai tujuan pembinaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak terletak pada kurangnya pedoman pembinaan untuk para pembina dalam rangka membuat dan melaksanakan program kegiatan pembinaan yang lebih khusus kepada anak didik pemasyarakatan yang terprogram dan kurangnya inisiatif dari para petugas.

c. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia atau individu yang saling berhubungan satu sama lain dalam hal hubungan sosial, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem yang memiliki norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut dalam hal hidup bersosial. Maka dari itu faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan mengenai masalah hukum, pemahaman akan hukum, perilaku hukum dan sikap hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Hal hal yang menjadikan Warga masyarakat mematuhi hukum dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum;
- 2) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan;
- 3) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.

Seperti yang di tegaskan oleh Bapak Sapto Isnugroho, S. Pd. mengenai perihal kurangnya peran serta masyarakat dan keluarga anak didik pemasyarakatan untuk mendukung dan memotivasi agar anak tersebut serius mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang telah diberikan juga menjadi salah satu faktor terhambatnya pembinaan.

Berdasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari wawancara dengan responden penulis mengukur keefektifan pelaksanaan pembinaan bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar yang berdasarkan atas sumber dari Teori Efektifitas menurut pendapat Richard M. Steers⁸⁴ sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan

Menegenai masalah tentang Pencapaian tujuan dimana diartikan sebagai keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin akan terwujud, diperlukan tahapan-tahapan, baik dalam arti tahapan-tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya (kurun waktu).

Pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I di Blitar dalam prakteknya terdapat kekurangan seperti yang telah dijelaskan di atas, pada intinya tujuan akan pembinaan anak yang dicapai sebagaimana yang telah dihimpun oleh penulis di lokasi penelitian dalam pemberian pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum kurang efektif.

⁸⁴ M Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 9

b. Integrasi

Integrasi diartikan sebagai perihal yang menyangkut pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan pengembangan konsensus, sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam bentuk organisasi lainnya. Dan adapun sebuah Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar dalam kesehariannya selalu melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga Pembinaan lainnya baik yang berhubungan secara vertikal maupun yang sejajar termasuk Organisasi Masyarakat /LSM untuk mengawasi, mengevaluasi maupun membahas mengenai proses pembinaan yang terbaik bagi anak-anak yang menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar .

c. Adaptasi

Yang dimaksudkan dengan Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses asimilasi anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I A Blitar dalam pelaksanaannya pembinaan yang diberikan kepada anak-anak berhasil sehingga pada saat bebas dari masa hukuman dapat diterima oleh masyarakat mana saja.

D. Hambatan-Hambatan dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Perlu disadari bahwa keberadaan perangkat hukum yang dimiliki, khususnya dalam kaitannya dengan peradilan pidana anak masih sangat terbatas, tidak tuntas dan lengkap sebagaimana idealnya suatu proses pembinaan generasi muda suatu bangsa yang maju. Bangsa Indonesia terlampau banyak mempunyai persoalan, sehingga tidak sempat lagi berfikir dan memoerhatikan aturan-aturan hukum berkaitan dengan kehidupan dan masa depan anak. Kalaupun ada, namun masih patut dipertanyakan sampai sejauhmana efektifitas pelaksanaannya, sehingga mencapai titik keadilan optimal sesuai peradapan Pancasila di dunia yang semakin global.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor penghambat efektifitas pembinaan anak didik Pemasyarakatan, antara lain :

1. Dari sisi peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana anak; sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sampai sekarang belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya. Kondisi tersebut telah berdampak pada terjadinya kesulitan dalam menjalankan proses peradilan pidana bagi anak. Semenjak proses penyidikan, pemeriksaan polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan oleh hakim sampai proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, masing-masing pihak yang berwenang menggunakan ketentuan yang tidak seragam. Hal ini dapat dimengerti karena bagi aparat penegak hukum akan sulit baginya hanya mengacu pada ketentuan undang-undang pengadilan anak yang keberadaannya sangat umum.

2. Belum tersedianya peraturan pemerintah tersebut menimbulkan hambatan dalam upaya menyediakan tenaga dengan spesifikasi keahlian. Polisi belum banyak punya penyidik anak, jaksa belum banyak memiliki jaksa, penuntut umum anak, dan pengadilan belum banyak memiliki hakim anak. Demikian halnya lembaga pemasyarakatan jumlahnya masih sangat terbatas dengan pola pembinaan yang masih belum semaksimal yang diharapkan. Untuk menyediakan tenaga khusus untuk anak, tentu diperlukan perangkat hukum yang bersifat tetap. Suatu lembaga penegakan hukum tidak dimungkinkan membuat suatu kebijakan tanpa didasarkan pada pedoman yang baku dan kriteria yang jelas. Memang dalam undang-undang telah disebutkan perlunya penyediaan tenaga dengan keahlian sesuai bidang-bidang tertentu, namun hal tersebut masih perlu dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
3. Minimnya perangkat perundang-undangan tersebut juga berimplikasi terhadap proses peradilan dan pembinaan anak. Seringkali ditemukan kenyataan seaneak anak dalam proses penyidikan diperlakukan sebagaimana penyidikan terhadap anak dewasa, demikian pula dalam proses pemeriksaan, penuntutan oleh jaksa dan proses persidangan di pengadilan. Anak dengan kondisi fisik yang besar namun usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun dihadapkan ke Sidang dengan proses peradilan sebagaimana anak dewasa. Tentunya menjadi persoalan tersendiri, apalagi bila eksekusi pidana yang dijatuhkan hakim, akhirnya menempatkan si terpidana pada lembaga pemasyarakatan untuk anak dewasa. Hal tersebut akan semakin memperumit persoalan anak yang bersangkutan.

4. Keterlibatan penasihat hukum dan petugas pemasyarakatan yang salah satunya terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan belum sampai posisi yang dijalankan. Pembimbing Kemasyarkatan masih belum dilibatkan dalam lingkup sangat terbatas, seperti halnya dalam proses pembimbingan klien anak di luar lembaga pemasyarakatan dan pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan sidang pengadilan anak. Padahal apabila peranan dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan ini dioptimalkan, undang-undang juga telah mengamanatkan untuk memanfaatkan pertimbangan-pertimbangan petugas ini, mulai dari tahap penyidikan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Demikian halnya penasihat hukum, tidak jarang keberadaannya dianggap memperlambat proses peradilan, sehingga kehadirannya tidak terlalu diharapkan oleh sebagian pihak. Padahal penasihat hukum adalah pembanding dari sisi hukum untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian pelaksanaan hukum pidana anak.
5. Sikap dan perilaku sewenang-wenang dan tidak adil menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya system pemidanaan terhadap anak di Indonesia. Kasus penganiayaan anak saat ini menjalani penahanan dan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu kenyataan yang masih dijumpai. Di samping itu disparitas (ketidaksamaan) dan diskriminasi perlakuan dari sisi hukum tidak jarang ditemukan, dimana dalam kasus tertentu yang sebenarnya dalam kategori ringan, anak-anak terpaksa harus melalui perjalanan panjang dari proses peradilan pidana dan akhirnya mengantarkannya ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun sebaliknya beberapa

kasus lain dengan bobot dan kualitas kejahatan yang lebih berat, ternyata dengan berbagai alasan atau dengan diam-diam dibebaskan. Hal ini sangat sulit untuk diketahui penyebabnya, namun dalam kenyataan tentu bukan informasi baru. Kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang demikian menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana.

6. Dari hasil penelitian dilapangan, petugas masih banyak dihadapkan dengan masalah keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan bagi anak, seperti keterbatasan penyediaan fasilitas kesehatan dan jumlah anggaran kesehatan yang tidak memadai, terbatasnya peralatan dan bahan latihan kerja, sarana olah raga dan kesenian serta pemenuhan kebutuhan sarana / fasilitas pendidikan bagi anak, seperti terbatasnya anggaran untuk penyediaan buku-buku pelajaran, bahan perpustakaan, peralatan seragam sekolah yang akhirnya dapat menghambat proses belajar mengajar yang seharusnya tetap diberikan kepada mereka secara layak.